

POTENSI PERTANIAN DAN PROSPER AGROINDUSTRI DIJAWA TENGAH*

*Gunawan Sumodiningrat***

Pendahuluan

Secara keseluruhan sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan, baik pembangunan regional maupun dalam skala nasional. Namun selama beberapa tahun terakhir kontribusinya semakin menurun sejalan dengan meningkatnya peranan sektor-sektor industri dan jasa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian secara perlahan-lahan bergeser dari agraris ke industri sejalan dengan proses pembangunan pada lazimnya. Kendati demikian sektor pertanian diharapkan tetap mampu menjalankan peranannya dalam pembangunan, yakni dalam hal: (1) menyediakan pangan bagi masyarakat, (2) memberikan kesempatan kerja, (3) menghemat dan menghimpun devisa, dan (4) memberikan dukungan untuk berkembangnya sektor-sektor lain.

Dalam hal menyediakan pangan dan memberikan kesempatan kerja, kemampuan sektor ini sudah teruji ketangguhannya, yakni dengan berhasilnya swa-sembada beras pada tahun 1984. Sedangkan dalam hal menghemat dan menghimpun devisa tampak dalam ketahanannya pada saat harga migas jatuh sektor pertanian merupakan penyelamat keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Gunawan Sumodiningrat, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, 1986). Namun demikian walaupun telah terjadi adanya kaitan sektor pertanian dengan sektor lain khususnya industri, keterkaitan ini dinilai belum pada proporsi yang memadai sesuai dengan yang diharapkan (UNDP-FAO, 1989).

Makalah ini berusaha melihat potensi sektor pertanian dan kaitannya dengan sektor lain khususnya sektor industri dengan tujuan dapat mengidentifikasi seberapa jauh daya dukung sektor pertanian terhadap sektor

* Tulisan ini disampaikan pada Seminar Ekonomi "Kesenjangan Pertumbuhan antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah", kerjasama Harian Suara Merdeka dengan Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 26 Juni 1989.

** Dosen Fakultas Ekonomi UGM dan Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan UGM. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Retno Winahyu dari P3PK-UGM yang telah mempersiapkan data dan analisis awal.

yang lain. Perhatian diutamakan pada prospek agroindustri di Propinsi Dati I Jawa Tengah, yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan industri tangguh didukung pertanian yang kuat.

Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Regional

Sumbangan Sektor Pertanian Dalam Pendekatan Regional

Sumbangan sektor pertanian dalam PDRB tampak semakin menurun, meskipun demikian peranannya masih cukup dominan dalam kegiatan ekonomi. Menurunnya peranan sektor pertanian sejalan dengan proses pembangunan dengan semakin meningkatnya peranan sektor industri dan jasa.

Dilihat dari angka mutlaknya kontribusi sektor pertanian dalam pendapatan regional tampak meningkat, namun apabila dilihat dari proporsi kontribusinya tampak menurun. Kendatipun demikian sektor pertanian masih menyumbangkan 31,6% dari seluruh PDRB Jawa Tengah.

Demikian pula pada sisi nilai ekspor, walaupun secara absolut terdapat kenaikan, proporsi sumbangannya nampak menurun. Nilai ekspor terbesar didominasi oleh sektor migas dan industri, sedangkan sektor pertanian menduduki peringkat terakhir, dengan sumbangan sebesar 20% dari seluruh nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 1987. Ekspor dari sub-sektor aneka industri tercatat meningkat cukup nyata dari 19 persen pada tahun 1984 menjadi 31 persen pada tahun 1987.

Tabel 1. *Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983-1989 (%)*

Lapangan Usaha	1983	1986	1989
1. Pertanian	34,90	33,83	31,7
1.1. Tan. Bahan Makanan	24,61	24,27	23,1
1.2. Tan. Perkebunan	3,87	3,83	3,6
1.3. Peternakan	3,05	2,75	2,4
1.4. Kehutanan	1,68	1,41	1,0
1.5. Perikanan	1,69	1,57	1,4
2. Pertambangan dan penggalian	0,45	0,56	0,7
3. Industri	11,50	14,01	16,3
4. Listrik Gas dan Air minum	0,50	0,73	1,0
5. Bangunan	5,60	5,31	7,7
6. Perdagangan Besar dan Eceran	20,21	18,58	16,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,35	4,37	4,2
8. Bank & Lembaga Keuangan lainnya	1,65	1,75	1,8
9. Sewa Rumah	4,31	3,72	3,1
10. Pemerintahan	13,26	13,89	13,9
11. Jasa-jasa	3,28	3,25	3,1
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00
Nilai (milyar Rp.)	6,916	8,560	10,789

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 1989
 Repelita V Jawa Tengah, 1989.

Tabel 2. Perkembangan Nilai Ekspor Jawa Tengah 1984 - 1987

Sektor	1984		1987	
	Nilai (000 Rp)	(%)	Nilai (000 Rp)	(%)
I. <i>Pertambangan</i>	235.386	58.00	201.763	48.63
II. <i>Industri</i>	83.413	20.53	129.565	31.18
- Aneka Industri	77.834	19.16	123.852	29.28
- Makanan Olahan	1.503	0.37	984	0.23
- Kerajinan	4.075	1.00	4.728	1.13
III. <i>Pertanian</i>	87.245	21.47	83.910	20.19
- Tanaman Pangan	2.442	0.60	92	0.02
- Perkebunan	30.926	7.61	29.906	7.20
- Peternakan	6.647	1.64	8.829	2.12
- Perikanan	35.593	7.41	25.141	6.05
- Rempah-rempah	340	0.08	651	0.15
- Kehutanan	11.268	2.77	19.288	4.65

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 1988
Repelita V Jawa Tengah.

Perkembangan Produksi dan Konsumsi Komoditas Pertanian

Keberhasilan program BIMAS yang diikuti oleh penerapan Panca Usaha Tani secara umum telah meningkatkan produksi *tanaman pangan* di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 1983-1988 produksi dan produktivitas padi telah meningkat sebesar 3,90% dan 4,11% per tahun. Sementara itu palawija, yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi-ubian meningkat masing-masing 10,13%, 17,17%, 0,99% dan 5,3% per tahun sejalan dengan peningkatan produktivitasnya. Demikian pula produksi tanaman sayuran dan buah-buahan cenderung meningkat (Jawa Tengah Dalam Angka 1988).

Sektor *perkebunan* yang merupakan andalan untuk ekspor, produksinya juga cenderung meningkat, kecuali untuk tanaman tembakau. Sementara itu sektor peternakan dan perikanan keadaannya tidak jauh berbeda. Data rinci mengenai produksi pertanian terdapat dalam lampiran.

Di sisi lain apabila dilihat perkembangan konsumsinya tampak adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin

meningkatnya pendapatan masyarakat. Proyeksi kebutuhan pangan penduduk Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perkiraan Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk Jawa Tengah

Komoditi	1989	1990	1991	1992
Padi	5.605.907	5.695.833	5.787.111	5.880.189
Jagung	506.878	511.819	516.806	521.829
Ketela	1.716.845	1.741.156	1.765.803	1.790.499
Ubi	194.519	284.154	293.916	316.727
Kedelai	141.520	146.356	151.288	156.610
Kacang Tanah	79.781	84.444	94.122	103.141
Sayuran	995.149	1.042.210	1.053.823	1.086.922
Buah-buahan	1.144.563	1.195.387	1.247.265	1.303.137

Sumber: Repelita V Jawa Tengah

Bila tabel konsumsi penduduk tersebut dikaitkan dengan tingkat produksi dari berbagai tanaman pertanian, akan diperoleh angka adanya surplus produksi, baik pada tanaman pangan maupun pada tanaman hortikultura. Sementara itu pada tanaman perdagangan yang tingkat konsumsi penduduknya masih sangat kecil, surplus produksi pada umumnya digunakan untuk keperluan ekspor dan sebagai bahan baku bagi sektor industri.

Sumbangan Sektor Pertanian dalam Menyediakan Kesempatan Kerja

Data Sensus Penduduk 1980 dan SUPAS 1985 menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di pedesaan cenderung menurun. Jika pada tahun 1980 penduduk yang tinggal di pedesaan mencapai 81,25%, maka pada tahun 1985 telah menurun menjadi 74,6%. Sementara itu apabila dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di pedesaan 0,5% dan di perkotaan 7%. Angka tersebut bila dikaitkan dengan pertumbuhan angkatan kerja terlihat adanya aliran angkatan kerja dari desa ke kota. Selama kurun waktu 1980-1985 angkatan kerja di kota telah tumbuh sebesar 8,49% per tahun, sedangkan di pedesaan hanya 1,29% per tahun.

Tabel 4. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Jawa Tengah 1980 - 1985

Lapangan Usaha	1980	1985	Peningkatan kesempatan kerja	Laju pertumbuhan kesempatan kerja
I. Pertanian	5.408.177 (54.21)	5.778.432 (50.90)	370.255 (26.92)	1.32
II. Industri	1.592.838 (15.96)	1.886.472 (16.17)	293.634 (21.35)	3.38
Pertambang	47.336 (0.47)	50.820 (0.45)	3.484 (0.25)	
Manufaktur	1.191.985 (11.95)	1.394.799 (12.29)	202.814 (14.74)	
Utilitas	9.148 (0.09)	6.426 (0.06)	-2.722 (-0.20)	
Konstruksi	344.369 (3.45)	434.427 (3.38)	90.058 (6.55)	
III. Jasa	2.975.168 (29.83)	3.686.759 (32.48)	711.591 (51.73)	4.29
Perdagangan	1.433.316 (14.37)	1.900.596 (16.74)	467.280 (33.97)	
Transportasi	231.760 (2.33)	344.593 (3.04)	112.833 (8.20)	
Keuangan	31.463 (0.32)	33.094 (0.29)	1.631 (0.12)	
Jasa Kemasy.	1.219.549 (12.22)	1.404.608 (12.37)	185.059 (13.45)	
Lain-lain	59.080 (0.59)	3.868 (0.12)	-55.212 (-4.01)	
Total	9.976.183 (100)	11.351.663 (100)	1.375.480 (100)	

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 1988.

Bila angka-angka tersebut dikaitkan dengan jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha maka terlihat adanya pergeseran penduduk yang bekerja di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dan label di bawah ini tampak bahwa meskipun secara absolut jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian meningkat, tetapi proporsinya cenderung menurun. Dilain pihak penduduk yang bekerja di sektor industri dan jasa cenderung meningkat.

Dilihat dari distribusinya secara sektoral terlihat adanya peningkatan kesempatan kerja yang besar dalam sektor jasa (51,73%) antara tahun 1980-1985. Diikuti oleh sektor pertanian (26,92%) dan industri (21,35%). Namun apabila dilihat laju pertumbuhan kesempatan kerjanya maka terlihat laju pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian paling kecil, yaitu hanya 1,32%. Sementara itu laju pertumbuhan sektor industri dan jasa masing-masing 3,38% dan 4,29% per tahun. Angka tersebut memberikan indikasi bahwa kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sudah semakin berkurang.

Prospek Agroindustri di Jawa Tengah

Kaitan Sektor Pertanian dengan Sektor Lainnya

Dalam suatu mekanisme pembangunan yang diharapkan, sektor-sektor yang ada dalam perekonomian pada dasarnya saling berkaitan, demikian pula

halnya dengan sektor pertanian dan sektor industri maupun jasa. Di satu sisi sektor tersebut harus mampu menawarkan produknya bagi kepentingan sektor yang lain, baik berupa "intermediate inputs" maupun berupa produk akhir. Disisi lain sektor pertanian harus mampu menyerap produk-produk sektor lainnya untuk menunjang kelangsungan produksinya. Agar hubungan antar sektor tersebut dapat terjaga, maka keseimbangan antar sektor harus seimbang, sehingga dalam proses perkembangannya dapat saling mendukung.

Kaitan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lain dapat dilihat pada Tabel Input-output Indonesia 1980. Dari tabel tersebut dapat diketahui kaitan kedepan (forward linkage) dan kaitan kebelakang (backward linkage) dari sektor pertanian. Kaitan kedepan dari sektor pertanian menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan industri hilir, sedangkan kaitan kebelakang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan industri hulu.

Dengan menggunakan data I/O nasional kaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa dapat ditunjukkan dalam tabel 5. Sebagai catatan, data I/O per daerah sampai saat ini belum tersedia di Indonesia. Namun demikian dengan menggunakan angka nasional sebagai rata-rata diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran keadaan Jawa Tengah.

Tabel 5. Hubungan Input-output dalam Perekonomian Indonesia 1980

Sektor	Efisiensi	Koefisien tenaga kerja	Retention ratio	Indeks kaitan ke depan	Indeks kaitan ke belakang
Pertanian	7,82	1,70	0,81	0,11	0,22
Industri	0,49	0,39	0,69	1,83	1,26
Jasa	2,67	0,59	0,66	0,76	1,66

Sumber: Murasa Sukarniputra, Analisa Input-Output Sebagai Kerangka Strategi Pembangunan Pertanian, Disertasi Doktor, UGM, 1986, dalam Mubyarto, Teori Model dan Strategi Pembangunan Pertanian. P3PK-UGM, 1986.

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa kaitan kedepan maupun kebelakang sektor pertanian relatif rendah dibanding sektor-sektor industri dan jasa. Meskipun kaitan kebelakang tampak lebih tinggi dari pada kaitan kedepan. Rendahnya angka kaitan sektor memberikan indikasi kurangnya keterkaitan dengan sektor lain. Angka kaitan sektor yang rendah ternyata konsisten dengan angka "retention ratio" yang tinggi. Angka "retention ratio" yang tinggi memberikan indikasi bahwa lebih banyak produk yang digunakan sebagai input bagi sektor itu sendiri.

Rendahnya angka kaitan sektor bersama-sama dengan tingginya angka "retention ratio" di sektor pertanian memberikan indikasi bahwa prosesing dari hasil-hasil pertanian masih lemah. Namun bila dilihat dari efisiensi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sektor pertanian mempunyai angka cukup tinggi.

Keadaan di atas tentunya juga tidak lepas "dari kebijaksanaan industri secara nasional, dimana pada masa bonanza minyak, prioritas pengembangan industri adalah pada industri substitusi impor, sehingga kemungkinan menggunakan input dari sektor pertanian untuk industri relatif kecil. Demikian pula apabila dilihat kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, maka tampak bahwa sektor industri hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Hal ini memberikan dukungan bukti bahwa sektor industri yang dikembangkan pada masa silam lebih banyak menggunakan teknik produksi padat modal sebagai komplemen kebijaksanaan yang berorientasi pertumbuhan. Keadaan ini kemungkinan juga terjadi di daerah Propinsi Jawa Tengah.

Prospek Agro-industri di Jawa Tengah

Penurunan proporsi sektor pertanian baik dalam sumbangannya terhadap pendapatan regional maupun dalam menyerap tenaga kerja di Jawa Tengah, tidak selalu berarti adanya penurunan peran sektor tersebut dalam perekonomian secara keseluruhan. Rendahnya kaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor industri dan jasa memberikan indikasi bahwa sumberdaya maupun hasil produksi sektor pertanian belum didayagunakan secara optimal. Pengembangan sektor industri

yang didukung oleh pertanian yang kuat dalam jangka panjang akan mampu menciptakan ketahanan sektor industri yang senantiasa berkembang tumbuh. Orientasi pengembangan ini adalah menem-patkan sektor pertanian pada proporsi sebenarnya. Yang pada gilirannya mampu menciptakan pembangunan nasional yang berkembang tumbuh. Konsekwensi dari orientasi ini adalah perhatian pada sektor pertanian harus semakin lebih besar lagi, dengan mengacu pada mekanisme pasar yang berlaku (UNDP-FAO, 1989).

Dengan adanya kemajuan teknologi, sektor pertanian mempunyai kesempatan makin luas dalam mendukung kegiatan sektor lainnya. Intensifikasi pertanian menumbuhkan industri mesin-mesin dan peralatan pertanian. Demikian pula berbagai industri kimia yang menyediakan pupuk, obat-obatan dan pakan ternak sebagai pendukung perkembangan sektor pertanian. Di samping itu sektor pertanian juga akan merangsang pertumbuhan berbagai industri pengolahan. Dengan mekanisme ini maka sektor pertanian harus mempunyai daya beli memadai. Daya beli yang memadai hanya dapat dicapai jika pendapatan produsen di sektor pertanian lebih tinggi dibanding penge-luarannya baik untuk berproduksi maupun untuk melangsungkan kehidupan petani beserta keluarganya.

Di Jawa Tengah dimana surplus pertanian cukup besar dan tenaga potensial tersedia, pengembangan agroindustri akan mempunyai keuntungan komparatif yang tinggi. Upah yang dituntut oleh tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian pedesaan pada umumnya tidak lebih tinggi dibanding upah tenaga kerja di luar sektor pertanian. Jarak fisik kegiatan produksi sektor industri dengan kantong-kantong produksi pertanian, terutama perkebunan dan peternakan relatif dekat, sehingga biaya keseluruhan relatif murah. Demikian pula prasarana maupun sarana produksi cukup tersedia, sehingga relatif tidak diperlukan modal awal yang signifikan untuk keperluan pengembangan industri tertentu. Berbeda dengan daerah di luar Jawa yang ketersediaan prasarana dan sarananya, seperti misalnya prasarana transportasi, yang terbatas, menyebabkan investor kurang terangsang untuk menanamkan modalnya.

Sehubungan dengan hal ini kiranya pemerintah daerah Jawa Tengah harus menciptakan iklim yang mendukung bagi pertumbuhan agro-industri, yakni

dengan memberikan "*kemudahan-kemudahan*" bagi investasi di sektor tersebut. Pemberian "*kemudahan*" ini berkaitan dengan arah *debirokratisasi* dan *deregulasi* dengan mengutamakan pengembangan sektor potensial kepada pelaku ekonomi yang mempunyai kemampuan riil dalam pengembangan usaha. Prioritas pengembangan perlu diberikan kepada daerah dengan potensi riil yang mampu mendayagunakan sumberdaya yang ada.

Dalam pengembangan agroindustri UNDP-FAO memberikan isyarat bahwa negara berkembang akan banyak memetik manfaat tidak saja dalam hal mengurangi ketergantungan import tetapi sekaligus menciptakan dasar perubahan di daerah pedesaan. Namun demikian jika tidak dilaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa pengembangan agroindustri justru dapat menyebabkan adanya keterbelakangan bagi sektor pedesaan, menimbulkan kesenjangan serta meningkatnya biaya sosial (*social cost*).

Dalam kaitan ini diperlukan campur tangan pemerintah dalam lingkup: (1) Deregulasi, dengan mengurangi pembatas yang berkaitan dengan pengembangan produksi; (2) Kebijakan harga, subsidi input, pajak, kredit dan pinjaman lunak, sehingga dapat lebih memberikan insentif bagi pengembangan agroindustri; dan (3) Penciptaan infrastruktur yang dapat memperlancar hubungan antara kota dan desa. Penelitian dan pengembangan khususnya dalam hal *basic research* seperti pemuliaan tanaman, *breeding* hewan, konservasi sumber-alam dan perlindungan lingkungan. Dalam hal penyuluhan, perlu ditingkatkan kearah pertanian sebagai unit usaha yang berorientasi pertanian sebagai perusahaan (*agrobusiness*) (Rusdian Lubis, dalam UNDP-FAO, 1989, halaman 51-52, Annexes 4).

Namun demikian, walaupun belum ada penelitian yang mendalam tentang pengembangan agroindustri secara tuntas di Indonesia (UNDP-FAO, 1989), tetapi di Jawa Tengah sudah terlihat arah dari perkembangan usaha ini. Dalam skala industri menengah dan besar, jenis industri *makanan*, *minuman* dan *tembakau* merupakan sub-sektor dengan jumlah industri paling banyak (530 buah), sesudah industri tekstil dan pakaian jadi (682 buah).

Tabel 6. Industri Menengah dan Besar di Jawa Tengah
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja
1986

Macam industri	Banyaknya perusahaan	Banyak tenaga kerja	
		Dibayar	Tidak dibayar
Makanan-minuman	530	107.407	1.088
Tekstil, pakaian jadi	682	89.345	935
Kayu	83	6.271	99
Kertas	79	7.376	57
Kimia	158	28.794	116
Galian	218	10.976	288
Logam dasar	1	432	4
Barang dari logam	115	9.344	96
Lain-lain	34	2.417	41
J u m l a h	2.200	262.362	2.724

Sumber: Biro Pusat Statistik Jakarta
Jawa Tengah Dalam Angka 1988.

Dari sebanyak 530 buah jenis industri makanan, minuman dan tembakau ini, jumlah sub-sektor industri paling banyak adalah *industri es batu* (53 buah), *industri rokok kretek* (23 buah), *industri minyak goreng dari kelapa* (22 buah) dan *industri pengolahan teh* (20 buah) (lihat Jawa Tengah Dalam Angka 1988, halaman 232-233). Disamping itu jenis industri ini mampu menyerap tenaga kerja dibayar dan tidak dibayar paling banyak, yaitu masing-masing 107.407 orang dan 1.088 orang. Dengan demikian setiap industri ke-lompok jenis ini mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebanyak 205 orang. Angka rata-rata ini jauh lebih besar dibanding rata-rata penyerapan tenaga kerja pada sub-sektor industri pakaian jadi yang hanya mampu menyerap sebanyak 132 orang per industri.

Industri skala kecil nampaknya lebih banyak berkembang dengan menggunakan sumberdaya yang ada di daerah. Dapat diamati bahwa jenis industri pangan jumlahnya paling banyak (236.925 buah). Disusul dengan industri kerajinan umum (164.268 buah) dan jenis industri sandang dan kulit (71.397 buah). Disamping itu jumlah penyerapan tenaga kerjanya pun cukup besar. Jenis

industri paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pangan (761.597 orang), kemudian kerajinan umum (418.532 orang). Sedangkan dari segi nilai produksinya, jenis industri pangan memberikan nilai produksi paling tinggi yakni lebih dari satu milyar rupiah pada tahun 1987/1988.

*Tabel 7. Industri Kecil di Jawa Tengah Tahun 1987/1988
Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi*

Jenis Industri	Jumlah Unit	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (juta Rp)
1. Pangan	236.925	761.597	1.050.611
2. Sandang dan kulit	71.397	312.160	404.166
3. Kimia dan Bangunan	93.399	392.794	735.764
4. Kerajinan dan Umum	164.268	418.532	194.816
5. Logam	22.672	82.775	206.050
Total	588.661	1.967.858	2.591.409

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 1988.

Berdasarkan angka-angka di atas menempatkan sektor pertanian pada proporsi yang memadai menuju pembangunan yang sustainable, dengan pemberian prioritas pada pengembangan industri skala kecil diharapkan dapat menjamin penyediaan kesempatan kerja lebih luas, sekaligus memberikan penghasilan bagi sebagian besar pelaku ekonomi di pedesaan dan mendayagunakan sumberdaya riil yang ada secara optimal.

Kendala Pengembangan Agroindustri

Dalam upaya menempatkan sektor pertanian pada proporsi yang sebenarnya, UNDP-FAO mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pengembangan agribusiness yaitu: (1) terbatasnya prasarana pemasaran, meliputi jalan-jalan, tenaga listrik, dan prasarana lepas panen; (2) keterbatasan adanya kredit yang tersedia; (3) keterbatasan tenaga teknisi terdidik yang mampu mengelola kegiatan lepas panen dan pengolahan; (4) penawaran bahan baku yang

tidak dapat dipastikan, dalam bentuk jumlah, mutu dan keteraturan (timing); dan (5) kendala administratif, birokrasi dan kendala hukum dalam memulai pengembangan usaha agribisnis (halaman 28). Dalam upaya merangsang pengembangan usaha di daerah, maka kendala-kendala tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sedangkan pada tahun 1985, PPE-FE-UGM berhasil mengidentifikasi beberapa pembatas pengembangan investasi di daerah, khususnya di Jawa Tengah antara lain adalah:

Pertama, peraturan-peraturan pusat dan daerah yang mengatur kegiatan ekonomi pada umumnya dan perpajakan khususnya dirasakan sering *berubah-ubah* sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian bagi dunia usaha;

Kedua, pada suatu pihak *suku bunga* mungkin dirasakan terlalu tinggi sehingga para pemilik modal merasa lebih untung untuk mendepositokan uangnya di bank yang tidak banyak risikonya dari pada menanam modalnya di bidang-bidang usaha baru yang belum pasti hasilnya;

Ketiga, karena *informasi* mengenai potensi-potensi yang terkandung di daerah-daerah (yang "rural" khususnya) tidak ada pada pihak calon-calon investor, sedangkan untuk mengadakan survai pendahuluan atau pra-investasi dirasakan terlalu mahal baginya (halaman 4).

Dari kesekian hambatan, dua hal penting yang menjadi kendala pengembangan industri adalah *infrastruktur* dan penentuan *lokasi*. Keengganan investor untuk mengadakan investasi adalah keterbatasan infrastruktur, sehingga bagi swasta yang ingin investasi perlu bantuan pemerintah daerah untuk menyediakannya. Sedangkan dalam hal pemilihan lokasi seringkali proyek investasi yang diusulkan pemerintah daerah mempunyai kesamaan antara satu daerah dengan lain sehingga sering terjadi kebijaksanaan yang *tumpang tindih*.

Masalah yang berkaitan dengan infrastruktur dan penentuan lokasi perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah daerah yang selanjutnya juga harus dipahami oleh pembuat kebijaksanaan di tingkat pusat. Usul dan rencana dari pemerintah daerah harus dapat dijadikan pedoman di tingkat pusat, bukannya daerah yang melaksanakan rencana dari atas. Sebab dengan prosedur seperti ini

seringkali proyek tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan potensi dan kondisi daerah setempat (Studi Khusus, P3PK-UGM, 1988). Oleh karena itu diperlukan adanya *kesamaan pandang* di antara pihak terkait: baik bagi investor, pemerintah daerah maupun depar-temen teknis, di pusat maupun di daerah. Bahkan dalam kaitan agroindustri, pelaku ekonomi lainnya sebagai penyedia bahan baku, yakni petani produsen perlu dipertimbangkan keberadaannya sehingga manfaat yang diperoleh dalam pengembangan agroindustri tidak mengecewakan.

Secara ekonomis kendala pengembangan suatu proyek agroindustri dapat dilihat dari 6 (enam) kriteria (PPE-FE- UGM, 1985, halaman 40-45), yaitu:

- (1) *kriteria peluang pasar*, yaitu aspek pemasaran yang dapat diukur dari perkembangan permintaan terhadap produk yang bersangkutan;
- (2) *kriteria peluang bersaing*, yang juga merupakan aspek pemasaran dan dapat diukur dengan seberapa jauh luas wilayah pemasaran yang dapat dijangkau oleh produk bersangkutan, baik regional, nasional maupun lingkup ekspor;
- (3) *kriteria keterkaitan dengan industri hulu-hilir*, menunjukkan akibat yang akan terjadi terhadap jenis industri yang berada pada hulu, yakni industri pendukung serta pada hilir, yakni industri penyerap produk, bagi jenis industri tertentu yang akan dikembangkan. Kriteria ini diukur dengan besarnya aliran input-output dari sektor-sektor terkait. Semakin besar angka kaitan ini semakin besar pengaruh industri yang dikembangkan dan semakin besar pula kemungkinan berkembangnya agroindustri tertentu;
- (4) *kriteria kemudahan memperoleh bahan baku*, ketersediaan bahan baku baik dalam jumlah, mutu dan keteraturan waktu dapat mendorong berkembangnya suatu industri;
- (5) *kriteria daya serap tenaga kerja*, kriteria ini merupakan indikator makro yang justru sering menjadikan konflik dalam pengambilan keputusan. Pengembangan industri dengan kemampuan menyerap tenaga kerja tinggi secara makro diharapkan tetapi pada umumnya industri yang padat tenaga mempunyai kemampuan berkembang lambat dan produktivitas lebih rendah

dibanding industri seiupa dengan menggunakan teknik padat modal atau capital intensif;

- (6) *kriteria kelayakan bagi produsen*, merupakan kriteria utama bagi pelaku ekonomi yang rasional. Bagi investor, proyek akan dilaksanakan hanya apabila keuntungan yang diperoleh memadai. Hal ini sedikit berbeda dengan penilaian dari segi pemerintah, pembuat kebijaksanaan yang hams juga menggunakan kriteria sebagai "agent of development". Dengan demikian penentuan kebijaksanaan pengembangan agroindustri perlu dipertimbangkan dengan mengikutsertakan pelaku ekonomi yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Daerah Jawa Tengah mempunyai potensi pengembangan agroindustri cukup memadai. Menggunakan 6 (enam) kriteria kelayakan investasi dapat diamati bahwa sektor pertanian merupakan sektor potensial untuk dikembangkan (lihat lampiran). Di 12 (dua belas) Dati II se Jawa Tengah semua mempunyai potensi untuk dikembangkan agroindustri. Disini terlihat bahwa potensi pengembangan satu daerah dengan yang lain kadangkala serupa, sebagai misal potensi pengembangan *industri makanan ternak unggas* yang potensial dikembangkan di 8 (delapan) Dati II di Jawa Tengah. Dengan demikian pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan secermat mungkin sehingga tidak terjadi kebijaksanaan yang tumpang tindih.

BKPM Jawa Tengah pun telah melakukan penelitian dan berhasil mengidentifikasi potensi industri pertanian (lihat Proyeksi Penanaman Modal di Jawa Tengah Dalam Repelita IV, Pemda Dati I Jawa Tengah, tanpa tahun). Hasil penelitian ini perlu diinformasikan kepada pihak terkait dan pihak yang berminat dalam investasi agroindustri, sehingga dapat mendayagunakan potensi pertanian yang ada sebaik-baiknya.

Penutup

Proporsi sektor pertanian dalam menyumbang pendapatan regional dan ekspor memang menurun, tetapi tidak berarti bahwa sumbangannya dalam pembangunan juga menurun. Adanya surplus dari sektor pertanian, baik berupa

tenaga kerja maupun produksi pertanian, disertai dengan kemajuan teknologi akan mengembangkan sektor pertanian. Pengembangan industri dasar maupun pengolahan pangan dan jasa-jasa yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian sampai saat ini merupakan upaya yang perlu dilestari-kan.

Karena pada masa silam prioritas pengembangan masih pada industri substitusi impor, maka pengembangan industri kurang mendayagunakan potensi sektor pertanian secara memadai. Pengembangan agroindustri di Jawa Tengah yang mempunyai keuntungan komparatif yang memadai akan mampu menciptakan kaitan erat diantara industri tangguh yang didukung oleh sektor pertanian kuat. Insentif yang memadai perlu diberikan kepada sektor pertanian sehingga mampu berkembang tumbuh, sehingga kaitan sektor pertanian ke depan perlu lebih diperhatikan. Kaitan sektor kedepan yang berkembang tumbuh mensyaratkan adanya imbalan memadai bagi pelaku-pelaku ekonomi di sektor tersebut. Imbalan disebut memadai jika surplus yang diciptakan dapat diaktualisasikan sebagai investasikan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari produk dalam proses produksi berikutnya.

Dalam kaitan ini paling sedikit ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan industri tangguh yang didukung oleh pertanian kuat, yakni: Pertama, menempatkan sektor pertanian pada proporsi yang sebe-narnya melalui bekerjanya mekanisme pasar. Proporsi sebenarnya adalah sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada, antara lain melalui pengembangan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Agrobases industri merupakan pilihan yang tepat dalam pengembangan di Jawa Tengah. Pengembangan agrobases industri didasarkan atas bekerjanya mekanisme pasar dimaksudkan menggunakan prinsip comparative advantage dan menerapkan instrumen ekonomi. Kedua, mendorong berkembangnya kekuatan menawar bagi petard produsen sehingga produksi yang diperoleh dapat memadai bagi berkembangnya usaha mereka yang berkembang tumbuh. Kekuatan menawar akan muncul jika petani dapat bergabung dalam satu wadah yang dapat membawakan aspirasi bersama. Dalam wadah ini masalah dirumuskan dan dipecahkan bersama di antara para petani. Permasalahan yang sering muncul

bertalian dengan pemilihan faktor produksi, pelaksanaan produksi dan pemasaran hasilnya. Melalui kekuatan menawar yang tinggi nilai tambah akan diperoleh petani bukannya jatuh pada pihak lain yang terkait kegiatan petani. Ketiga, menempatkan pelaksanaan reorientasi pembangunan berdasarkan pada potensi dan keadaan daerah setempat dengan sebesar-besarnya mengikut sertakan pelaku ekonomi di daerah. Kesamaan pandang dan kebersamaan perlu dihayati oleh segenap pelaku ekonomi dengan satu semboyan pembangunan yang berlanjut (sustainable) adalah hams muncul *dari, oleh dan untuk* sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini pemerataan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha perlu lebih diciptakan khususnya bagi rakyat pedesaan sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka.

Yogyakarta, 24 Juni 1989

Daftar Acuan

- Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Beberapa terbitan, Jakarta.
- _____, *Buletin Ringkas EPS September 1988*, Jakarta. Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka 1988*.
- Gunawan Sumodiningrat, "Efisiensi dan Keadilan dalam Sektor Pertanian", dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPF, Yogyakarta, 1986. Republik Indonesia, *Nota Keuangan 1989-1990*, Jakarta 1989.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, *Proyeksi Penanaman Modal di Jawa Tengah Dalam Repelita IV*.
- _____, *Rencana Pembangunan Tahun Kelima Daerah 1989/1990 - 1993/1994*. *Proyek Perencanaan Profil Investasi*, PPE-FE-UGM dan BKPM Jawa Tengah, 1985. Beberapa Jilid.
- Studi Khusus: *Persiapan Proyek Bangun Desa Tahap II Yogyakarta*, Kerja-sama DirJend Bangda Depdagri, Bappeda Propinsi DIY dan P3PK-UGM, Yogyakarta, 1988.
- UNDP-FAO, *A Synthesis of Indonesia's Agricultural Policy Options For Repelita V*, 1989/90-1993/94, Jakarta, Januari 1989, Dan Annexes 1-5.